

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2013
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)
- Dianti, F. *Hukum Pembuktian di Indonesia*, Jakarta. 2023.
- Hamzah, Andy. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta. 2008
- Harahap, Yahya. *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Jakarta. 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty), Yogyakarta, 2006
- Moeljatno. *Hukum Pidana*, Jakarta. 2008
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi)*, Sinar Grafika, Jakarta 2010
- Purwoleksono, Didik. *Hukum Acara Pidana*, Surabaya. 2015
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Thomas Weigend. *The Potential to Secure a Fair Trial Through Evidence Exclusion : A German Perspective*
- Oddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*. 2024

JURNAL

- Adam Ilyas. (2021). *Praktik Penerapan Exclusionary Rules di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum 50 (1) 49-59*
- Carla Nathania. (2018). *Perlindungan Hak Tersangka Melalui Penerapan " Exclusionary Rules of Evidence " dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.*

- Djiwandono, D.A Ylma, F.T. Sella, D.Q.A.N. (2024). "Prinsip *Exclusionary Rules Of Evidence* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika". *Junal Unes Law Review*, 6 (4)
- Hermansyah, Ssitem Pembuktian pada Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pemberantasan Korupsi di Indonesia, *Jurnal Swara Justisia* Volume 4, 2020.
- Raja Yuhaini et al., "Exclusionary Rules Dalam Tahap Pembuktian Di Pengadilan Guna Memperoleh Alat Bukti Yang Sah," no. 3 (2022): 838– 47.
- Nyoman Satyayudhadananjaya, "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) DiKaji Dari Perspektif Subsistem Kepolisian," *Vyavahara Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Hukum IX*, no. 1 (2014): 87–94.
- Muhammad Husein Maruapey, "Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara," *Ilmu Politik Dan Komunikasi* 7, no. 1 (2017): 1–19.
- Mubayyinah, F. Perbandingan Sistem Hukum Pembuktian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Perkara Tindak Pidana Lainnya, *Al Hikmah Jurnal Studi Keislaman*. Vol.7, Nomor 1, 2017.
- Yurina Ningsi Eato, "Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana," *Lex Crimen* 6, no. 2 (2017): 75–82.
- Hartiati Kalia, "Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang- Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/PID.B/2010/PN.DGL)," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1, no. 4 (2013): 1–9.
- M Latifah, "Perlukah Mengatur Prinsip Exclusionary Rules of Evidence Dalam RUU Hukum Acara Pidana?(Should We Regulate Exclusionary Rule Principle in the Criminal ...," ... *Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan ...*, 2021, 101–22, <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/2123>.
- Marlina, D. (2022). "Presumption of Innocence and Its Implementation in Indonesian Criminal Justice System." *Journal of Law and Justice*, 19(4), 300-315.
- Oaks, D. H. (1970). Studying the Exclusionary Rule in Search and Seizure. *The University of Chicago Law Review*, 37(4), <https://doi.org/10.2307/1598840>
- Sari, N. (2021). "Presumption of Innocence in Indonesian Criminal Law: Analysis of Legal Principles and Practices." *Indonesian Journal of Criminal Law*, 18(2), 150-165.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 183

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Nomor 127 Sekretariat Negara: Jakarta.

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981. Sekretariat Negara: Jakarta.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 Tahun 2002. Sekretariat Negara: Jakarta.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014. Sekretariat Negara: Jakarta.

Perkap Polri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan: Jakarta

Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019. Tentang Penyidikan Tindak Pidana. . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1134 Tahun 2019. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan: Jakarta

4th Amendment of The United States of America.

Yurisprudensi Mapp vs Ohio (penggeledahan dan penyitaan), Miranda vs Arizona, US vs Wade dan Gilbert vs California (testimony identification) dan Rochin and California (shocking method).

Strafprozessordnung (StPO) - Kode Prosedur Pidana Jerman , Pasal 136a yang mengatur tentang larangan interogasi yang melanggar hak asasi manusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (*Bundesverfassungsgericht*)

WEBSITE

Ichsan Zikry, Mengenal “Exclusionary Rules”, <https://bantuanhukum.or.id/mengenal-exclusionary-rules/> , LBH Jakarta, 2014, diakses pada tanggal 14 Desember 2022 pukul 08:44 WIB.

Yusuf Abdhul, Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan dan Metode, <https://deepublishstore.com/studi-pustaka/>, deepublish store, 2021, diakses pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul 10:22 WIB.